

PENGARUH TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK DI PEMERINTAH DAERAH

Satria Adi Pratama¹, Maria Ekowati²

¹Universitas Terbuka Ilmu Pemerintahan, ²Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 2026

Revised: June 2026

Accepted: July 2026

Available online: June 2026

Korespondensi Email:

¹rezabimantara44@gmail.com,

²maria_ekowati@ipdn.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Transparansi anggaran merupakan salah satu bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat. Keterbukaan informasi dianggap memiliki peran krusial karena berkaitan langsung dengan tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan daerah. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan setiap warga negara berhak mengetahui mekanisme pengelolaan dan penggunaan anggaran daerah sebagai wujud akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Dari situasi tersebut muncullah pertanyaan penelitian utama yaitu sejauh mana transparansi anggaran memengaruhi kepercayaan publik pada pemerintahan daerah. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dampak

transparansi anggaran terhadap kepercayaan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan. Metode kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan kuesioner skala Likert sebagai instrumen pengumpulan datanya. Penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan 100 responden yang terdiri dari individu yang pernah menerima atau mengetahui informasi terkait anggaran pemerintah daerah. Analisis data dilaksanakan menggunakan regresi linier sederhana untuk mengukur besarnya pengaruh transparansi anggaran terhadap kepercayaan publik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa tingkat transparansi anggaran tergolong tinggi dengan persentase rata-rata 77,5% sementara tingkat kepercayaan publik berada pada kategori cukup tinggi dengan nilai rata-rata 74%. Studi ini membuktikan bahwa transparansi anggaran memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah disarankan untuk terus memperkuat keterbukaan informasi anggaran agar lebih mudah dipahami serta diakses oleh publik.

Kata Kunci: Transparansi Anggaran, Kepercayaan Publik, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan kini menjadi fokus utama yang terus disoroti pada pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah. Saat ini warga tidak sekadar mengharapkan pemerintah sanggup merealisasikan berbagai program pembangunan melainkan mereka juga mendambakan kejelasan menyangkut pemakaian dana yang berasal dari publik. Kejelasan semacam itu dinilai vital karena alokasi anggaran daerah bersumber dari pendanaan yang berhubungan erat dengan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya publik memiliki kepentingan untuk memahami proses perencanaan anggaran beserta penggunaannya serta mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Keterbukaan informasi anggaran bukan semata-mata tentang keberadaan dokumen atau laporan keuangan yang dimiliki pemerintah melainkan juga menyangkut tingkat aksesibilitas serta pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut. Dalam kenyataannya masih banyak warga yang menemui hambatan saat mencoba memahami informasi anggaran karena penyampaian sering menggunakan istilah teknis dan format laporan yang rumit. Keadaan seperti ini dapat mengubah cara pandang publik terhadap kinerja pemerintah daerah khususnya dalam menumbuhkan kepercayaan bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan penuh tanggung jawab.

Pengelolaan anggaran daerah yang dijalankan secara terbuka dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk membina hubungan yang lebih erat dengan warga. Dengan adanya akses informasi yang jelas tentang penggunaan dana publik maka tingkat kecurigaan terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan dapat ditekan. Namun ketika akses terhadap informasi tersebut terhalang atau penyampaian sulit dimengerti maka masyarakat bisa beranggapan bahwa pemerintah kurang transparan dalam mengelola keuangan daerah. Menurut Rahim (2024) transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bermutu sehingga keterbukaan bukan sekadar kewajiban administratif melainkan elemen krusial dalam membangun kepercayaan publik.

Transparansi pada era tata kelola pemerintahan modern sering dihubungkan dengan prinsip *good governance* yang menjadi standar penyelenggaraan negara. Pemerintah daerah tidak hanya diwajibkan melaksanakan program kerja saja melainkan juga menyediakan akses bagi warga untuk mengetahui seluruh kebijakan yang diterapkan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Menurut Mardiasmo (2021) keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik merupakan elemen krusial untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah karena masyarakat mempunyai hak untuk memahami proses perencanaan serta pemanfaatan anggaran daerah. Apabila informasi terkait pengelolaan anggaran tersedia secara terbuka maka masyarakat akan lebih mudah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah.

Tuntutan akan keterbukaan anggaran terus mengalami peningkatan yang sejalan dengan pertumbuhan kesadaran publik tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi yang diselenggarakan oleh negara. Upaya penyediaan akses terhadap informasi tersebut telah dilakukan oleh pemerintah di berbagai wilayah melalui laman resmi dan media sosial serta laporan publik yang diterbitkan secara berkala. Akan tetapi penyediaan informasi ini belum sepenuhnya dibarengi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami substansi dari informasi yang disajikan karena sebagian warga masih menganggap bahwa data anggaran sulit untuk dicerna akibat penggunaan istilah-istilah yang bersifat teknis. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi tidak semata-mata hanya tentang ketersediaan data melainkan juga menyangkut cara penyampaian informasi tersebut agar dapat dicerna secara lebih sederhana oleh khalayak umum.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengungkapkan keterkaitan antara keterbukaan anggaran dan tingkat keyakinan publik terhadap pemerintah. Masitha dan Mulyadi (2024) menjelaskan bahwa keterbukaan pengelolaan anggaran mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah sekaligus mengurangi munculnya kecurigaan terhadap pemerintah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memberikan dampak terhadap persepsi masyarakat mengenai integritas pemerintah daerah. Temuan lain dari Palulun dan Lambe (2025) juga memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi keuangan pemerintah dapat meningkatkan keyakinan masyarakat

terhadap lembaga pemerintahan karena masyarakat merasa memperoleh akses informasi yang lebih jelas.

Penelitian mengenai transparansi anggaran juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintah daerah. Pratama dan Kamela (2025) mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki peran dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah yang lebih terbuka dalam memberikan informasi anggaran cenderung memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik karena setiap penggunaan dana dapat diketahui secara lebih luas oleh masyarakat. Pada tingkat pemerintahan yang lebih kecil, Pratiwi dan Pangestika (2025) menemukan bahwa keterbukaan laporan keuangan mampu meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi memiliki peranan yang krusial tidak hanya di level pemerintah pusat ataupun wilayah daerah yang luas melainkan juga di dalam lingkup pemerintahan setempat.

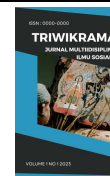
Kabupaten Way Kanan yang merupakan salah satu daerah otonom turut berhadapan dengan berbagai tantangan terkait keterbukaan informasi anggaran yang ditujukan bagi masyarakat. Pada dasarnya data mengenai pemanfaatan anggaran pemerintah daerah telah dapat diakses melalui beragam saluran media informasi namun masih ada potensi bahwa tidak seluruh warga mampu memahami isi dari informasi itu secara komprehensif. Kondisi ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut karena sejauh mana keterbukaan informasi yang dijalankan oleh pemerintah dapat membentuk opini publik terhadap pemerintah daerah terutama dalam upaya menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat.

Penelitian masih dibutuhkan untuk memahami cara transparansi anggaran mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh transparansi anggaran terhadap kepercayaan publik di pemerintah daerah? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu apakah transparansi anggaran berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik pada pemerintah daerah di Kabupaten Way Kanan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dampak transparansi anggaran pada kepercayaan publik sehingga dapat dihasilkan pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam membangun hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat.

METODE

Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam riset ini dengan tujuan mengidentifikasi dampak transparansi anggaran terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan memanfaatkan data yang bisa diukur secara numerik. Pendekatan tersebut dipilih karena dianggap sanggup mengungkap keterkaitan antar variabel secara terstruktur melalui analisis data yang diolah dengan metode statistik. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif dipakai untuk mengamati hubungan antar variabel dengan instrumen riset yang menghasilkan informasi berbentuk angka sehingga dapat dikaji secara sistematis.

Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Way Kanan sepanjang tahun 2026 ini melibatkan warga yang pernah menerima atau melihat serta mengetahui informasi tentang anggaran pemerintah daerah melalui media resmi dan media sosial serta sumber informasi lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana transparansi anggaran pemerintah daerah dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah setempat.



Penelitian ini menetapkan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang memiliki pengetahuan tentang anggaran pemerintah daerah sebagai populasi penelitian. Sampel kemudian ditentukan melalui penerapan teknik purposive sampling yaitu sebuah metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria spesifik yang telah diselaraskan dengan sasaran penelitian sehingga setiap individu yang terpilih benar-benar relevan dengan kebutuhan studi. Menurut Purwanza et al. (2022), purposive sampling diterapkan dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik responden dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang ditetapkan bagi para partisipan dalam studi ini mencakup individu-individu yang sebelumnya pernah menerima, menyaksikan, atau memiliki pengetahuan tentang informasi terkait anggaran pemerintah daerah. Sebanyak 100 orang dilibatkan sebagai responden dalam penelitian ini sehingga data yang terkumpul mampu menyajikan suatu pandangan menyeluruh mengenai bagaimana masyarakat memandang transparansi anggaran serta kepercayaan publik terhadapnya.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan memanfaatkan kuesioner berjenis angket yang menerapkan Skala Likert dengan lima kategori meliputi Sangat Tidak Setuju (STS) lalu Tidak Setuju (TS) kemudian Netral (N) lalu Setuju (S) serta Sangat Setuju (SS). Dua variabel penelitian diukur melalui instrumen penelitian tersebut yaitu transparansi anggaran yang diberi label X yang mencakup keterbukaan informasi dan kejelasan laporan serta aksesibilitas dokumen dan penyampaian informasi sedangkan kepercayaan publik yang diberi label Y meliputi kejujuran pemerintah serta keterlibatan masyarakat dan keyakinan terhadap kinerja pemerintah dan kepuasan terhadap pelayanan publik.

Instrumen penelitian harus melalui proses pengujian validitas dan reliabilitas terlebih dahulu sebelum data dianalisis sehingga setiap pernyataan yang diajukan telah terbukti layak untuk digunakan dalam penelitian. Ketepatan instrumen dalam mengukur variabel penelitian dinilai melalui uji validitas sementara tingkat konsistensi tanggapan dari responden diketahui dengan melakukan uji reliabilitas.

Analisis data dilaksanakan dengan penerapan regresi linier sederhana yang bertujuan mengidentifikasi dampak transparansi anggaran terhadap kepercayaan publik. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa regresi linier sederhana digunakan untuk meneliti hubungan serta pengaruh yang dimiliki oleh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

- Y = Kepercayaan Publik
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X = Transparansi Anggaran

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan dan besarnya pengaruh transparansi anggaran terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan suatu ilustrasi tentang betapa esensialnya transparansi anggaran untuk menciptakan relasi yang harmonis antara pemerintah di tingkat daerah dan warga masyarakatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menjadikan teori good governance dan teori transparansi pengelolaan keuangan publik sebagai landasan analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Dwiyanto (2021) menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip fundamental good governance yang menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat saat menyelenggarakan pemerintahan. Mardiasmo (2021) menandakan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan wujud keterbukaan pemerintah yang memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Kedua teori tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis bagaimana keterbukaan informasi anggaran mampu memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Penelitian ini dilaksanakan dengan melibatkan 100 responden dari masyarakat Kabupaten Way Kanan yang sebelumnya pernah menerima dan menyaksikan maupun sekadar mengetahui informasi tentang anggaran pemerintah daerah melalui berbagai saluran seperti media resmi pemerintah dan media sosial serta forum masyarakat dan juga sumber informasi lain. Kuesioner disebar oleh peneliti guna mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat keterbukaan anggaran dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Karakteristik responden pada penelitian ini dikelompokkan menurut jenis kelamin serta usia dan juga pekerjaan. Pengelompokan tersebut dilakukan agar diperoleh gambaran umum tentang latar belakang masyarakat yang menjadi objek penelitian. Berikut disajikan karakteristik responden yang didasarkan pada jenis kelamin.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	56	56%
Perempuan	44	44%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2026

Tabel 1 memperlihatkan bahwa mayoritas partisipan dalam studi ini terdiri dari 56 orang laki-laki (56%) sementara partisipan perempuan berjumlah 44 orang (44%). Variasi jumlah partisipan tersebut bukanlah indikasi dominasi kelompok tertentu melainkan merefleksikan partisipasi masyarakat yang cukup heterogen dalam mengevaluasi transparansi informasi anggaran pemerintah daerah. Karakteristik partisipan berdasarkan kategori usia kemudian diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah	Persentase
16-25 tahun	34	34%
26-35 tahun	29	29%
36-45 tahun	21	21%
>45 tahun	16	16%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2026

Dari Tabel 2, responden paling banyak yaitu rentang usia 16-25 tahun sebanyak 34% serta diikuti usia 26-35 tahun sebesar 29%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa responden penelitian didominasi oleh kelompok usia produktif yang relatif lebih aktif memperoleh informasi melalui media digital maupun sumber informasi publik lainnya. Adapun karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	27	27%
Pegawai Swasta	23	23%
Wiraswasta	19	19%
Petani	16	16%
Lainnya	15	15%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2026

Dari Tabel 3, responden penelitian berasal dari latar belakang pekerjaan yang cukup beragam. Kelompok pelajar/mahasiswa menjadi responden terbanyak sebesar 27%, diikuti pegawai swasta sebesar 23%. Keberagaman karakteristik dari para responden diharapkan dapat menghasilkan suatu gambaran yang lebih luas mengenai persepsi masyarakat terhadap transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan berfokus pada variabel transparansi anggaran dan kepercayaan publik sehingga dapat diketahui bagaimana keterbukaan informasi dari pemerintah daerah dipersepsikan oleh masyarakat dan bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan publik.

Hasil Pengukuran Variabel Transparansi Anggaran

Persepsi responden di Kabupaten Way Kanan diukur oleh peneliti untuk mengetahui tingkat transparansi anggaran pemerintah daerah melalui beberapa indikator seperti keterbukaan informasi serta kejelasan laporan kemudian aksesibilitas dokumen dan juga penyampaian informasi. Data mengenai variabel transparansi anggaran didapatkan dari jawaban responden pada kuesioner skala Likert yang telah dibagikan kepada 100 orang responden sehingga hasil pengukuran variabel transparansi anggaran tersebut dapat diperoleh.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Variabel Transparansi Anggaran

Indikator	Persentase	Kategori
Keterbukaan Informasi	81%	Tinggi
Kejelasan Laporan	74%	Cukup Tinggi
Aksesibilitas Laporan	76%	Tinggi
Penyampaian Informasi	79%	Tinggi
Rata-Rata	77,5%	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2026

Data yang tersaji pada Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Way Kanan mencapai 77,5% sehingga masuk dalam kategori tinggi. Temuan ini menandakan bahwa masyarakat menilai upaya keterbukaan

informasi anggaran oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan cukup memadai. Indikator keterbukaan informasi mencatat persentase tertinggi sebesar 81% yang menandakan bahwa masyarakat kini memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses informasi terkait penggunaan anggaran daerah melalui berbagai media yang disediakan pemerintah. Informasi tersebut biasanya didapatkan dari media sosial pemerintah dan laman resmi serta forum masyarakat tertentu sehingga temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai memiliki akses terhadap informasi anggaran pemerintah daerah. Meskipun demikian masih diperlukan penyederhanaan bahasa dalam penyajian laporan anggaran agar informasi yang tersedia dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indikator kejelasan laporan mendapatkan nilai paling rendah yaitu 74% namun posisinya masih berada dalam kategori yang cukup tinggi. Sejumlah responden menilai bahwa istilah-istilah yang digunakan dalam informasi anggaran masih sulit dipahami sehingga belum sepenuhnya mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Kondisi ini menandakan bahwa keterbukaan informasi tidak sekadar berhubungan dengan ketersediaan data melainkan juga cara informasi tersebut dapat dipahami oleh publik secara lebih sederhana. Menurut Betan dan Nugroho (2021) transparansi pengelolaan dana publik perlu dilaksanakan secara terbuka dan mudah dimengerti agar masyarakat bisa mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan anggaran. Oleh sebab itu penyampaian informasi anggaran yang lebih sederhana dinilai penting supaya masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga memahami isi dari informasi tersebut.

Hasil Pengukuran Variabel Kepercayaan Publik

Selain aspek transparansi anggaran kajian ini turut mengukur seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang berada di Kabupaten Way Kanan. Kepercayaan publik tersebut diukur menggunakan sejumlah indikator meliputi kejujuran aparatur pemerintah serta partisipasi warga lalu keyakinan atas kinerja pemerintahan dan juga kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada publik. Proses pengukuran ini dilakukan berdasarkan tanggapan dari para responden yang disampaikan melalui kuesioner dengan penerapan skala Likert. Hasil dari pengukuran variabel kepercayaan publik tersebut dapat diamati pada tabel yang tersaji di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Pengukuran Variabel Kepercayaan Publik

Indikator	Presentase	Kategori
Kejujuran Pemerintah	75%	Cukup Tinggi
Keterlibatan Masyarakat	71%	Cukup Tinggi
Keyakinan terhadap Kinerja Pemerintah	74%	Cukup Tinggi
Kepuasan terhadap Pelayanan Publik	76%	Tinggi
Rata-rata	74%	Cukup Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2026

Hasil pengukuran pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah berada pada angka rata-rata 74% dan masuk dalam kategori cukup tinggi. Temuan ini menggambarkan bahwa masyarakat memiliki keyakinan yang cukup baik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada aspek kepuasan terhadap pelayanan publik sebesar 76%. Persentase tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dinilai cukup memuaskan oleh sebagian besar responden. Meski demikian,

masih terdapat beberapa aspek pelayanan yang dianggap perlu memperoleh perhatian untuk ditingkatkan. Adapun, indikator keterlibatan masyarakat memperoleh nilai paling rendah yaitu 71%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan atau penyampaian informasi terkait penggunaan anggaran daerah.

Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Kepercayaan Publik

Setelah dilakukan pengukuran terhadap variabel transparansi anggaran dan kepercayaan publik, penelitian ini selanjutnya menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut untuk mengetahui apakah transparansi anggaran memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik pada pemerintah daerah di Kabupaten Way Kanan. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier sederhana untuk melihat hubungan antara transparansi anggaran dan kepercayaan publik. Hasil analisis mengindikasikan bahwa transparansi anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik di Kabupaten Way Kanan.

Hasil analisis pengaruh transparansi anggaran terhadap kepercayaan publik dapat dilihat pada tabel berikut:

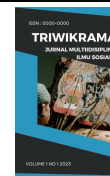
Tabel 6. Hasil Analisis Pengaruh Transparansi Anggaran terhadap Kepercayaan Publik

Komponen Analisis	Hasil	Interpretasi
Arah Hubungan	Positif	Transparansi anggaran meningkatkan kepercayaan publik
Tingkat Hubungan	Cukup Kuat	Kedua variabel memiliki hubungan yang saling berkaitan
Pengaruh Variabel	Ada Pengaruh	Transparansi anggaran berkontribusi terhadap kepercayaan publik

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada Tabel 6, dapat diketahui bahwa transparansi anggaran memiliki hubungan positif dengan kepercayaan publik di Kabupaten Way Kanan. Peningkatan keterbukaan informasi anggaran biasanya berjalan seiring dengan naiknya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah dan fenomena ini saling memengaruhi satu sama lain secara langsung.

Berdasarkan respons yang diberikan oleh para responden akses terhadap informasi mengenai alokasi dana memiliki pengaruh signifikan dalam membangun pandangan warga terhadap institusi pemerintahan daerah. Kemudahan dalam memperoleh serta memahami data keuangan publik membantu publik mengevaluasi proses pengelolaan anggaran sehingga tingkat kepercayaan terhadap aparat pemerintah mengalami peningkatan. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penggunaan dana merupakan elemen penting yang turut menentukan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di tingkat lokal. Seperti yang dijelaskan oleh Kewo (2024) tata kelola sektor publik yang efektif membutuhkan keterbukaan dan tanggung jawab yang tegas agar pelayanan terhadap warga dapat dilaksanakan dengan hasil maksimal. Ketika publik dapat mengakses informasi keuangan secara jelas dan tanpa hambatan maka timbul keyakinan bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi pengelolaan dana dengan cara yang lebih terbuka serta penuh tanggung jawab.



Tingkat kepercayaan publik tidak semata-mata dibentuk oleh keterbukaan anggaran karena sejumlah responden turut memandang bahwa standar pelayanan publik yang baik dan komunikasi dari pemerintah serta partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi ikut memberikan dampak terhadap kepercayaan mereka pada pemerintah daerah. Dengan demikian transparansi anggaran hanyalah satu dari sekian elemen penting sedangkan masih ada aspek-aspek lain yang ikut membentuk kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi anggaran memegang peran yang sangat signifikan untuk membangun hubungan yang harmonis antara pihak pemerintah dan masyarakat. Azan et al (2021) mengindikasikan bahwa prinsip good governance akan lebih mudah diwujudkan apabila pemerintah mampu memberikan pelayanan yang terbuka serta memberikan akses informasi kepada masyarakat. Transparansi anggaran merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk secara perlahan membangun kepercayaan dari masyarakat.

Temuan dari studi ini mendukung pandangan yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2021) yang menyatakan bahwa keterbukaan menjadi elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan transparansi dalam memberikan akses kepada publik untuk memahami proses penyelenggaraan pemerintahan dengan cara yang lebih terbuka.

Penelitian ini turut memperkuat temuan dari Masitha bersama Mulyadi (2024) yang menyiratkan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran mampu memperluas wawasan masyarakat mengenai pemanfaatan dana daerah sembari menekan risiko timbulnya rasa curiga terhadap pemerintah. Menurut Palulun dan Lambe (2025), transparansi serta akuntabilitas yang dijalankan pemerintah berkaitan erat dengan derajat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika instansi pemerintahan sanggup menyajikan data secara gamblang dan terbuka yang juga mudah diakses oleh publik maka masyarakat cenderung memberikan penilaian yang lebih positif.

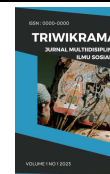
Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Data dikumpulkan hanya dari masyarakat Kabupaten Way Kanan dengan jumlah responden yang terbatas sehingga hasilnya belum mampu merepresentasikan situasi di seluruh wilayah secara komprehensif. Keterbatasan tersebut memberikan kesempatan bagi studi mendatang untuk mencakup area penelitian yang lebih luas serta mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian yang melibatkan 100 warga sebagai responden di Kabupaten Way Kanan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa transparansi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tergolong tinggi dengan angka rata-rata mencapai 77,5%. Angka ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah daerah dalam membuka informasi anggaran sudah dinilai cukup baik oleh masyarakat karena data tentang pemakaian anggaran tersedia lewat beragam media. Namun sebagian responden masih menghadapi kendala saat mencoba mengerti isi informasi yang diberikan akibat pemakaian istilah-istilah teknis yang sulit dipahami.

Pada variabel kepercayaan publik angka rata-rata yang didapatkan mencapai 74 persen sehingga masuk ke dalam kategori yang cukup tinggi. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sudah cukup baik terutama dalam hal



pelayanan publik serta keterbukaan informasi. Partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi dan juga proses penyebaran informasi masih harus diperkuat supaya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung lebih optimal.

Hubungan positif antara transparansi anggaran dan kepercayaan publik di Kabupaten Way Kanan ditunjukkan oleh data penelitian. Masyarakat mendapat kesempatan untuk memahami penggunaan anggaran daerah secara lebih jelas melalui keterbukaan informasi mengenai pengelolaan anggaran. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat didorong oleh kondisi tersebut sehingga transparansi anggaran tidak hanya terkait dengan pemenuhan kewajiban administrasi melainkan juga berperan dalam membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Saran

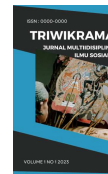
Pemerintah daerah di Kabupaten Way Kanan didorong untuk terus memperluas akses publik terhadap data anggaran berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan. Bahasa yang lebih sederhana serta mudah dimengerti perlu digunakan dalam penyampaian informasi tersebut agar warga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih terang mengenai alokasi dana daerah. Keterbukaan informasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana anggaran daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Penyebaran informasi mengenai anggaran tidak hanya bisa dilakukan dengan mengakses situs resmi pemerintah saja karena berbagai media yang lebih akrab dengan keseharian warga juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. Media sosial dan forum warga serta kegiatan sosialisasi yang digelar di tingkat desa dan kecamatan merupakan contoh nyata dari saluran informasi yang dekat dengan masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut maka jangkauan informasi anggaran akan semakin luas dan akses masyarakat terhadap informasi itu pun menjadi lebih mudah diperoleh.

Keterlibatan warga dalam mengawasi serta menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan. Partisipasi yang lebih giat dari masyarakat mampu menjadi alat untuk mempererat ikatan antara pemerintah daerah dan penduduknya sambil memupuk kepercayaan publik terhadap jalannya roda pemerintahan. Dengan demikian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik dapat ditingkatkan melalui peran aktif warga yang terus didorong dan difasilitasi oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azan, A. R., Hanif, A., & Fitr, A. T. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 39-46.
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133-139.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kewo, C. L. (2024). *Manajemen Kinerja Akuntansi Sektor Publik, Teori dan Aplikasi*. CV. Azka Pustaka.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Masitha, Z., & Mulyadi, D. Z. (2024). Transparansi keuangan daerah: Studi kualitatif tentang pengelolaan anggaran di Sulawesi Tenggara. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 225-235.
- Palulun, J., & Lambe, K. H. P. (2025). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan terhadap kepercayaan publik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Intan Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 57-63.



- Pratama, E. R., & Kamela, H. (2025). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi kuantitatif pada Kecamatan Sekupang. *Jurnal Indonesia Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 1(4), 157-162.
- Pratiwi, A. L., & Pangestika, M. A. (2025). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan masyarakat pada laporan keuangan Desa Pendawa Kabupaten Tegal. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 8400-8409.
- Purwanza, S. W., et al. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. CV. Media Sains Indonesia.
- Rahim, M. R. (2024). *Menuju transparansi dan akuntabilitas: Membangun fondasi pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas*. Deepublish.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2023). Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kepercayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 4(2), 88-99.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.